

Korelasi Umur, Penghasilan Tetap, Pendidikan Terakhir dan Rata-Rata Pengeluaran Pada Rumah Tangga Miskin di Kota Pangkalpinang

Marlina¹, Nurwasya², Devi Valeriani³, Ria Atlantika⁴

^{1,2} Bappeda & Litbang Kota Pangkalpinang

^{3,4} Program Studi Ekonomi, Universitas Bangka Belitung

inafitri621@gmail.com¹ nurwasya@pangkalpinangkota.go.id² deviyono92@gmail.com³

riaatlantika@gmail.com⁴

*Korespondensi: inafitri621@gmail.com

Abstrak: Kemiskinan menjadi salah satu masalah multidimensional yang harus diatasi. Kemiskinan memiliki karakteristik yang beragam. Karakteristik kemiskinan menjadi ciri-ciri individu atau kelompok tergolong keluarga miskin. Kemiskinan harus diatasi dengan kebijakan dan program pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik kemiskinan di Kota Pangkalpinang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi serta kuisioner kepada 100 sampel responden yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Dinas Sosial. Metode analisis yang digunakan adalah tabulasi data dan korelasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kepala keluarga yang disurvei terbanyak memiliki berjenis kelamin laki-laki, berumur 36-43 Tahun, pendidikan terakhir SMA, dengan status pernikahan terbanyak menikah dan jumlah anak sebanyak 2 sedangkan banyak tanggungan sebanyak 3 orang dalam 1 keluarga. Berdasarkan hasil korelasi diperoleh korelasi umur kepala keluarga dan penghasilan tetap kepala keluarga di Kota Pangkalpinang adalah negatif dan sangat lemah, korelasi penghasilan tetap kepala keluarga dan rata-rata pengeluaran kepala keluarga Kota Pangkalpinang adalah positif dan sedang, korelasi total penghasilan tetap dan rata-rata pengeluaran kepala keluarga Kota Pangkalpinang adalah positif dan sedang, serta korelasi pendidikan terakhir kepala keluarga dan penghasilan tetap kepala keluarga Kota Pangkalpinang adalah positif dan lemah.

Kata Kunci: Kemiskinan, Karakteristik, Penduduk Miskin

JEL : D6; I320; I380

1. PENDAHULUAN

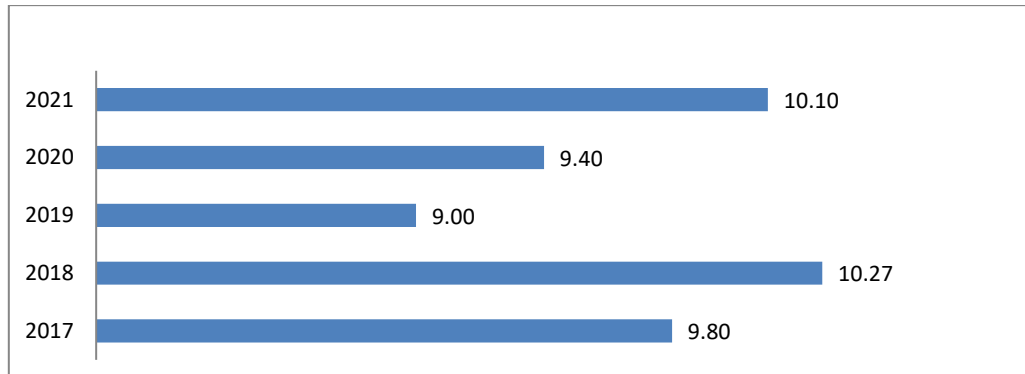
Kemiskinan adalah masalah multidimensional, tidak hanya masalah ekonomi saja namun juga menyangkut masalah sosial, budaya, dan politik. Karena sifatnya yang multidimensional, maka kemiskinan juga memerlukan solusi yang multidimensional. Berbagai program baik dari pemerintah pusat maupun daerah sudah diusahakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Saenong, 2016). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi pemerintahnya tidak terlepas dari upaya untuk mengatasi tingkat kemiskinan, walaupun provinsi ini berada pada peringkat ke-5 kemiskinan terendah dan memiliki tingkat ketimpangan pendapatan terendah se-Indonesia.

Tabel 1. Garis Kemiskinan Tahun 2016 – 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah Babel	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)				
	2020	2019	2018	2017	2016
Kepulauan Bangka Belitung	721.455	677.716	631.467	587.530	534.229
Bangka	577.093	541.925	497.164	475.024	427.684
Belitung	812.321	766.276	704.855	652.989	610.072
Bangka Barat	589.894	549.496	520.642	497.567	440.850
Bangka Tengah	721.331	693.842	680.907	653.308	586.445
Bangka Selatan	561.617	523.155	483.823	462.716	415.359
Belitung Timur	725.395	684.277	622.396	563.309	528.572
Kota Pangkalpinang	795.653	748.487	700.949	654.044	604.011

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2022)

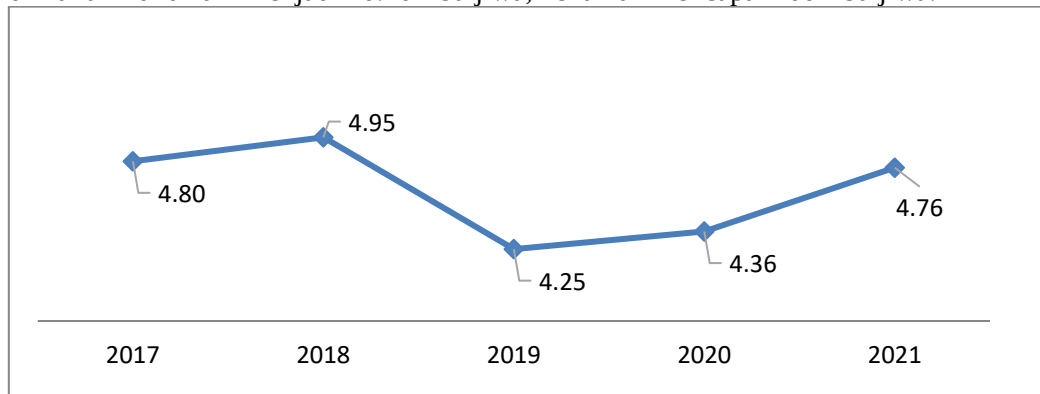
Pada Tabel 1. dapat diketahui Kota Pangkalpinang pada Tahun 2020 mempunyai Garis Kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 795.653. Garis kemiskinan di Kota Pangkalpinang selalu mengalami kenaikan setiap tahun nya, ini menunjukkan tingkat inflasi di Kota Pangkalpinang masih tinggi sehingga berdampak pada Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang.



Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2021 (Ribu Jiwa)

Sumber : BPS Kota Pangkalpinang, (2022)

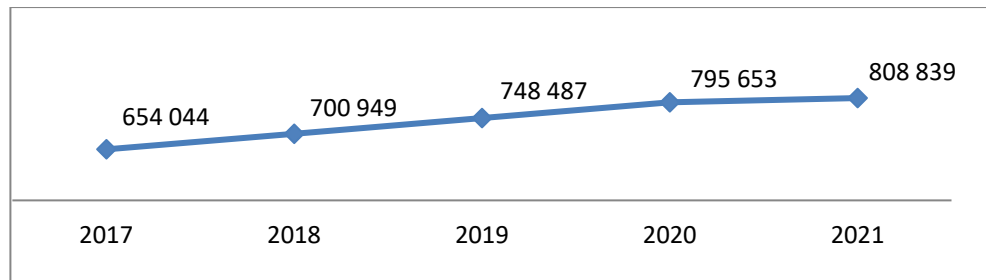
Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Pangkalpinang pada Tahun 2017 sampai 2021 yang cukup fluktuatif. Jumlah penduduk miskin tertinggi berada pada Tahun 2018 yaitu sebanyak 10,27 ribu jiwa atau sebesar 4,95 persen dari jumlah penduduk Kota Pangkalpinang, sedangkan posisi jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 9 ribu jiwa atau sebesar 4,25 persen dari dari jumlah penduduk Kota Pangkalpinang. Namun jika dilihat pada Tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang semula sebanyak 9,40 ribu jiwa di Tahun 2020 naik menjadi 10.10 ribu jiwa, kenaikan mencapai 700 ribu jiwa.



Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2021 (Persen)

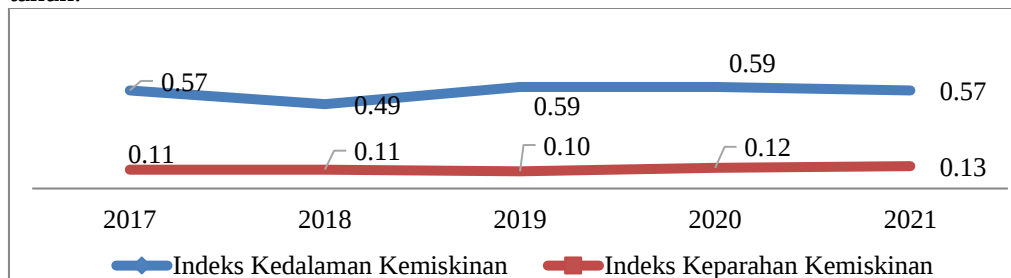
Sumber : BPS Kota Pangkalpinang, (2022)

Faktor utama penyebab tingginya garis kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari komponen pada garis kemiskinan komoditi makanan (GMK) yang memberi kontribusi sebesar 72,59 persen. Tingginya rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat untuk membeli komoditas makanan dikarenakan tingginya tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendorong kenaikan garis kemiskinan secara keseluruhan (Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, 2019). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang dapat dilihat garis kemiskinan Kota Pangkalpinang sebagai berikut :



Gambar 3. Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2021 (Rp/Kapita/Bulan)
Sumber : Pangkalpinang dalam Angka, (2022)

Garis kemiskinan Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan secara bertahap dari Tahun 2017 hingga 2021. Pada Tahun 2017, garis kemiskinan Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 654.044,- dan meningkat hingga menjadi Rp. 700.949,- pada Tahun 2018. Kemudian pada Tahun 2019 garis kemiskinan meningkat menjadi Rp. 748.487 dan meningkat lagi pada Tahun 2020 menjadi Rp. 795.653,-. Terakhir pada Tahun 2021 garis kemiskinan Kota Pangkalpinang mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar Rp. 808.839. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.



Gambar 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2021

Sumber : Pangkalpinang dalam angka, (2022)

Selain melalui garis kemiskinan persoalan kemiskinan juga dapat dilihat dari dimensi lain yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan tersebut. Indeks Kedalaman Kemiskinan/ *Poverty Gaps Index* (P1) merupakan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan.

Data BPS menunjukkan Indeks kedalaman kemiskinan yang dinyatakan oleh P1 sempat terjadi penurunan pada Tahun 2017 ke Tahun 2018 yaitu sebesar 0.08 dari 0,57 menjadi 0,49 sebesar 0.08. Kemudian pada Tahun 2018 ke Tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 0,10 dan pada Tahun 2020 masih di angka yang sama dengan Tahun 2019. Namun pada Tahun 2021 perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Pangkalpinang kembali mengalami penurunan menjadi 0,57. Selama periode lima tahun terakhir, tingkat kedalaman kemiskinan tertinggi berada di Tahun 2019 dan 2020 dan terendah berada di Tahun 2018. Sejalan dengan indeks kedalaman kemiskinan, perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kota Pangkalpinang mulai meningkat pada Tahun 2020 ini, dimana terjadi peningkatan indeks keparahan kemiskinan dari yang semula 0,10 di Tahun 2019 menjadi 0,12 di Tahun 2020 dan naik menjadi 0.13 pada Tahun 2021. Keadaan ini mencerminkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Kemiskinan

2.1.2.1. Teori Konservatif

<https://equity.ubb.ac.id/index.php/equity>

doi 10.33019/equity.v%vi%i.112

Menurut Teori Konservatif, kemiskinan tidak bermula dari struktur sosial, melainkan berasal dari karakteristik orang-orang miskin itu sendiri (misalnya malas, boros, tidak merencanakan kehidupannya, fatalis dan pasrah pada keadaan). Penduduk miskin mempunyai budaya miskin (*culture of poverty*). “Penyebab mereka miskin, karena mereka miskin. Penyebab orang menjadi miskin adalah karena ia terjebak dalam perangkap kemiskinan (kemiskinan materil, kelemahan jasmani, isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan)” (Nazamuddin, 2009). Kemiskinan merupakan masalah sosial dan kultural, sehingga penanggulangan kemiskinan harus melibatkan transformasi sosial dan kultural pula, termasuk perubahan nilai-nilai (misal etos kerja).

2.1.2.2. Teori Liberal

Teori Liberal menyatakan bahwa manusia sebenarnya adalah makhluk yang baik, tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Bila kondisi sosial ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang yang sama, maka budaya kemiskinan akan segera ditinggalkan. Kemiskinan yang meluas merupakan tantangan besar terhadap upaya-upaya pembangunan. Kemiskinan merupakan faktor penghambat pembangunan, karena dengan adanya kemiskinan berarti terdapat ketergantungan. Salah satu indikator umum yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di suatu negara adalah tingkat kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*). Total *Poverty Gap* dapat diukur dengan cara membandingkan pendapatan minimal atau garis kemiskinan dengan pendapatan yang diperoleh penduduk miskin. Total poverty gap menunjukkan nilai total pendapatan suatu negara yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan penduduk dibawah garis kemiskinan menjadi diatas garis kemiskinan.

2.1.2.3. Jenis Kemiskinan

Subagio et all (2001) menyatakan bahwa berdasarkan kajian-kajian dari data empiris menyebutkan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan. Pertama, kemiskinan yang ditimbulkan oleh faktor alamiah, yaitu kondisi lingkungan yang miskin, ilmu pengetahuan yang tidak memadai, adanya bencana alam dan lainnya. Kedua, kemiskinan yang disebabkan karena faktor non-alamiah, yaitu adanya kesalahan kebijakan ekonomi, korupsi politik yang tidak stabil, kesalahan pengelolaan sumber daya alam dan lainnya. Menurut Sumodiningrat (1999) klasifikasi kemiskinan ada lima kelas, yaitu absolut dan relatif, kultural dan struktural, lingkaran kemiskinan, statis dan dinamis, dan sementara serta kronis.

2.1.2.4. Kriteria Kemiskinan

Menurut Sajogyo (1977) cara mengukur kemiskinan dengan pendekatan kemiskinan absolut adalah dengan memperhitungkan standar kebutuhan pokok berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi (kalori dan protein). Terdapat tiga golongan orang miskin yaitu golongan lapisan miskin yang mempunyai pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 480 kg, golongan miskin sekali yang memiliki pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak 240-360 kg, dan lapisan paling miskin yang memiliki pendapatan perkapita per tahun beras sebanyak kurang dari 240 kg. Bank Dunia dalam BPS (2000) menetapkan bahwa seseorang dikatakan miskin apabila pendapatannya dibawah US \$ 2 per hari. Badan Pusat Statistik (BPS) juga memberikan pemikiran untuk mengukur garis kemiskinan dengan cara menentukan berapa besar kalori minimum yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam sehari.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sudibia dan Marhaeni menyimpulkan bahwa dalam penetapan strategi pengentasan kemiskinan dengan 2 strategi kluster, strategi kluster 1 untuk keluarga yang benar-benar miskin, artinya pendapatan sangat rendah dan pendidikan juga rendah, strategi kluster 2 untuk yang lebih tinggi dan lebih mapan dibanding kluster 1. Ginanjar *et.al* dalam penelitiannya mengenai target capaian indikator makro Provinsi Banten memberikan hasil bahwa PDRB ADHB maupun

ADHK, PDRB per Kapita, laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, angka kematian bayi, angka partisipasi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama telah tercapai sedangkan angka kematian ibu, usia harapan hidup, dan angka partisipasi kasar sekolah menengah atas sederajat belum mencapai target. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti menyimpulkan bahwa variabel PDRB dan IPM mempengaruhi variabel kemiskinan dengan nilai R-square sebesar 56,8 persen. Penelitian yang dilakukan oleh Devi dan Taftazani mengenai pemetaan wilayah Kabupaten Pekalongan dengan hasil pembobotan indikator dengan AHP menunjukkan bahwa indikator kemiskinan prioritas adalah kondisi rumah, kepemilikan, aset, sumber energi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pengeluaran untuk pangan. Hasil penelitian yang dilakukan Fadilla menemukan bahwa kebijakan dan strategi pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang baik kebijakan vertikal maupun koordinasi hubungan antara SKPD dalam pengentasan kemiskinan sudah berjalan cukup baik.

3. METODE

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari artikel, dan jurnal-jurnal ekonomi lain yang relevan dan menunjang kajian. Data Primer diperoleh langsung dari stakeholder penanggulangan kemiskinan yang diperoleh melalui Wawancara dengan Stakeholder (Tokoh Masyarakat, Pemerintah Kota Pangkalpinang, Badan Usaha, Kelompok Masyarakat Miskin). Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil publikasi Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang serta menggunakan buku-buku, literatur, artikel, dan jurnal-jurnal ekonomi lainnya yang relevan dan menunjang kajian.

3.2. Objek Penelitian

Penelitian ini mengkaji masyarakat miskin yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pangkalpinang yang berasal dari 7 kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Intan, Gabek, Gerunggang, Girimaya, Pangkal Balam, Rangku dan Taman Sari dengan total populasi sebanyak 22.993 KK. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan metode *stratified sampling*, sehingga dalam penelitian ini diperoleh responden yang digunakan sebanyak 100 jiwa.

3.3 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Tabulasi data dengan langkah-langkah yang dilakukan:
 - A. Menyusun instrumen penelitian berupa kuisioner yang berisi pertanyaan.
 - B. Melakukan pengumpulan data kepada responden yang telah ditentukan oleh peneliti.
 - C. Pengolahan data dengan cara mengumpulkan data dan memeriksa kelengkapan kuisioner yang telah diisi, melakukan tabulasi dari hasil kuisioner dan melakukan analisis data.
2. Korelasi Pearson merupakan metode analisis data yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain dengan tidak mempersoalkan apakah suatu variabel tersebut saling berpengaruh atau tidak (Sekaran, 2010). Korelasi akan membentuk garis linier (garis lurus), jika semakin kuat atau tinggi derajat hubungan maka akan membentuk garis linier (garis lurus) antara kedua variabel atau lebih. Berikut koefisien korelasi berdasarkan hubungannya:

Tabel 2. Koefisien Korelasi

No	Koefisien Korelasi	Hubungan Korelasi
1	0,81 – 1,00	Sangat Kuat
2	0,61 – 0,80	Kuat
3	0,41 – 0,60	Sedang
4	0,21 – 0,40	Lemah
5	0,00 – 0,20	Tidak ada hubungan

Sumber: Sugiyono, 2013

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Penduduk miskin di Kota Pangkalpinang yang disurvei memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang menandakan masyarakat tersebut masuk ke dalam kelompok miskin di Kota Pangkalpinang, berikut karakteristik tersebut:

a. Jenis Kelamin dan Umur Kepala Keluarga

Berdasarkan hasil survei jumlah kepala keluarga penduduk miskin yang disurvei terbanyak berjenis kelamin laki-laki yaitu 77 persen sedangkan perempuan 23 persen. Umur KK terbanyak berada di rentang usia 36-43 tahun sebanyak 30 responden. Termuda pada rentang usia 20-27 Tahun dan tertua pada rentang usia 76-83 Tahun.

b. Pendidikan Kepala Keluarga dan Status Pernikahan

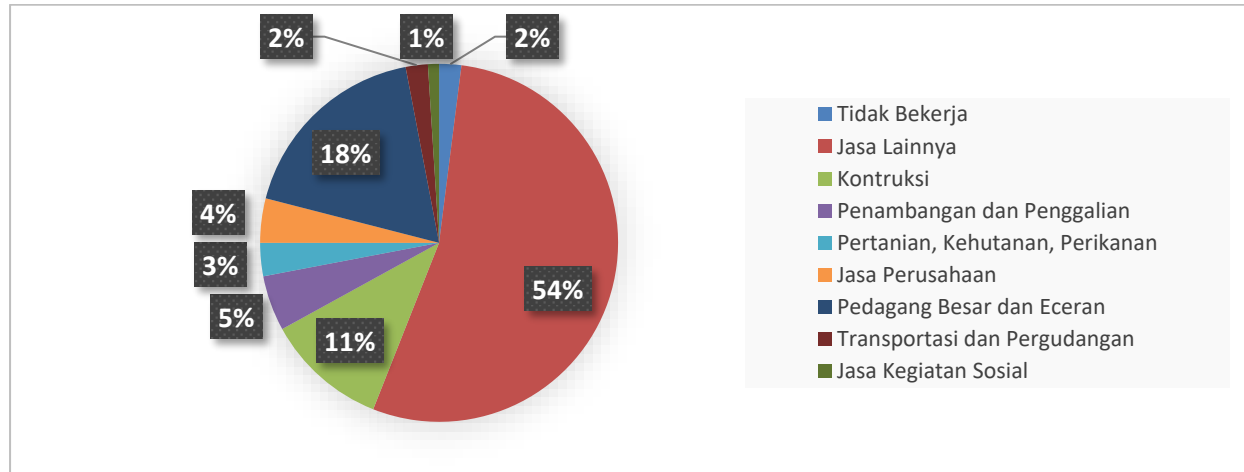
Berdasarkan hasil survei sebanyak 50 orang kepala keluarga/responden memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA, tidak tamat SD sebanyak 3 orang, SD sebanyak 25 orang, SMP sebanyak 14 orang serta D3 dan S1 masing-masing sebanyak 4 orang. Status pernikahan kepala keluarga terbanyak yaitu menikah ada 73 orang, belum menikah ada 8 orang, cerai hidup ada 7 orang dan 12 orang memiliki status cerai mati.

c. Jumlah Anak dan Jumlah Tanggungan Responden

Berdasarkan jumlah anak yang dimiliki responden, terdapat 31 responden memiliki anak sebanyak 2 anak. Sedangkan responden yang tidak memiliki anak ada 13 responden dan terdapat 2 responden yang memiliki anak hingga 8 anak. Terdapat 35 responden memiliki jumlah tanggungan sebanyak 3 orang. Tanggungan tersebut terdiri dari istri/suami dan anak serta terdapat beberapa responden menanggung orang tua, saudara dan menantu.

d. Pekerjaan Kepala Keluarga

Berikut hasil survei yang dilakukan:



Gambar 5. Pekerjaan Kepala Keluarga Responden Kota Pangkalpinang

Sumber: Hasil Survei, 2022

Berdasarkan pengelompokan lapangan pekerjaan, kelompok pekerjaan terbanyak yaitu pada sektor Jasa Lainnya sebanyak 54 persen yang terdiri dari buruh harian, penyedia jasa seperti pembuat batu bata, tukang cabut rumput, pembantu rumah tangga, pengurus kontrakan keluarga, petugas kebersihan dan pungut uang kubur. Sedangkan kelompok pekerjaan yang paling sedikit yaitu jasa kegiatan sosial, seperti pekerjaan Tagana.

e. Karakteristik Tempat Tinggal Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang

<https://equity.ubb.ac.id/index.php/equity>

doi 10.33019/equity.v%vi%i.112

Berdasarkan karakteristik tempat tinggal responden, sebanyak 66% menempati rumah milik sendiri, 26 % menumpang dengan keluarga dan 8 % mengontrak. Luas lantai tempat tinggal responden cukup bervariasi mulai dari 6 meter persegi sampai 528 meter persegi. Terdapat 41 responden memiliki luas lantai antara 6-70 meter persegi. Tempat tinggal responden terbuat dari jenis bangunan permanen dan semi permanen. Jenis bangunan rumah responden terbanyak yaitu dari jenis bangunan permanen terdapat 87 % dengan lantai rumah terbanyak terbuat dari keramik 70 % dan hanya 1 % responden memiliki lantai rumah dari tanah. Daya listrik yang terpasang di rumah responden terbanyak berdaya 900 watt terdapat 77 responden. Sebanyak 90 responden yang disurvei sudah memiliki kendaraan motor dan terdapat 10 responden tidak memiliki motor. Responden yang memiliki motor ada yang berjumlah 2 atau 3 buah hal ini dikarenakan motor tersebut dipakai untuk anak sekolah atau untuk kepala keluarga bekerja. Terdapat 4 responden memiliki mobil pribadi. Rentang pengeluaran pulsa listrik responden yaitu berkisar antara Rp 101.000 sampai Rp 200.000 yaitu terdapat 49 responden. Untuk sumber air responden terbanyak bersumber dari air sumur yaitu 85 responden, selain itu terdapat juga responden yang menggunakan air bor dan PDAM.

f. Pendapatan dan Pengeluaran Responden

Pendapatan tetap kepala keluarga rata-rata berkisar antara Rp 1.600.000 – Rp 2.000.000 yaitu sebanyak 21 responden. Terdapat 3 responden atau kepala keluarga memiliki pekerjaan sampingan yang bekerja sebagai mengantar barang (Rp1.500.000); mengangkut sampah (Rp 1.500.000) dan berjual sayur (Rp700.000). Rata-rata pengeluaran responden di Kota Pangkalpinang perbulan berkisar antara Rp 501.000 – Rp 1.000.000 sebanyak 21 responden dan Rp 1.100.000 – Rp 1.500.000 juga sebanyak 21 responden. Pengeluaran tersebut digunakan untuk memenuhi primer berupa kebutuhan makanan dan non makanan. Sebanyak 74 persen pengeluaran tersebut untuk kebutuhan makanan dan 26 persen kebutuhan non makanan yang terdiri dari pakaian, biaya pendidikan, membayar cicilan dan kebutuhan tak terduga lainnya.

g. Kebutuhan Lain-lain

Berdasarkan jaminan kesehatan responden Kota Pangkalpinang terdapat 94 persen sudah memiliki jaminan kesehatan sedangkan 6 responden belum memiliki jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan tersebut terdiri dari BPJS PBI sebanyak 70 responden, BPJS Non PBI kelas 1 ada 2 responden, BPJS Non PBI kelas 2 ada 6 responden, BPJS Non PBI kelas 3 ada 14 responden dan asuransi lainnya ada 2 responden. Biaya yang dikeluarkan oleh responden untuk biaya jaminan kesehatan mulai dari Rp 35.000 ada 11 responden yang termasuk dalam BPJS Non PBI kelas 3, Rp 50.000 ada 1 responden, Rp 100.000 ada 5 responden, Rp 140.000 dan Rp 150.000 masing-masing ada 2 responden dan Rp 175.000 ada 1 responden. Pengeluaran untuk jaminan kesehatan tersebut dikeluarkan responden per bulan. Terdapat 79 persen responden tidak memiliki tabungan dan hanya 21 responden memiliki tabungan. Tabungan yang dimiliki oleh responden mulai dari Rp 100.000 hingga Rp 6.000.000. Terdapat 89 responden tidak memiliki hutang sedangkan 11 responden memiliki hutang. Jumlah hutang yang dimiliki responden mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 48.000.000. digunakan untuk membiayai kebutuhan pokok, membayar uang kredit kendaraan, dan tanah.

h. Jenis Bantuan Pemerintah yang Diterima Periode (2020-2021)

Berdasarkan data DTKS terdapat 89 responden yang disurvei menerima bantuan dari pemerintah sedangkan terdapat 10 responden tidak menerima bantuan dan terdapat 1 responden tidak mengambil bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut terdiri dari PKH ada 15 responden, PKH (BPNT) ada 16 responden, BPNT ada 13 responden, BLT ada 41 responden, penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan dan Prakerja masing-masing 2 orang. Periode penerimaan bantuan ada waktunya konsisten dan ada yang tidak menentu, bahkan ada bantuan yang diterima hanya 1 kali selama tahun 2020-2021 seperti bantuan

sembako. Bentuk abnuan yang diterima 53 responden menerima uang dan 36 responden menerima barang. Penerima BLT terbanyak mendapatkan uang sebesar Rp 600.000 yang penerimaannya 3 bulan atau 6 bulan sekali. Penerimaan barang ditunjukkan untuk Penerima PKH BPNT dan penerima BPNT saja mendapatkan uang dalam bentuk non tunai digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warung yang bekerjasama dengan bank). Jumlah uang non tunai sebesar Rp 200,000 yang penyalurannya tiap bulan atau dirapel 3 atau 6 bulan sekali. Barang yang diterima berupa beras, sayur, daging ayam, tahu/tempe, telur. Alokasi Uang untuk makanan, pakaian, rokok, pulsa, kesehatan, pendidikan, bayar cicilan, ditabung dan modal usaha. Terdapat 20 responden yang mendapatkan bantuan kedua. Berupa KIP sekolah 5 responden, BLT 11 responden, bantuan rumah 2 responden, bantuan BPJS kesehatan mandiri ke pemerintah 1 orang dan prakerja 1 orang. Bantuan kedua tersebut terbanyak disalurkan dalam bentuk uang ada 17 responden. Jumlah uang yang diterima yaitu mulai dari Rp 200.000 hingga Rp 10.000.000 (Rp 10.000.000 untuk bantuan rumah tahun 2019). Sedangkan untuk bantuan ketiga, terdapat 5 responden yang menerima bantuan BLT minyak goreng, bantuan UMKM dan KIP pendidikan.

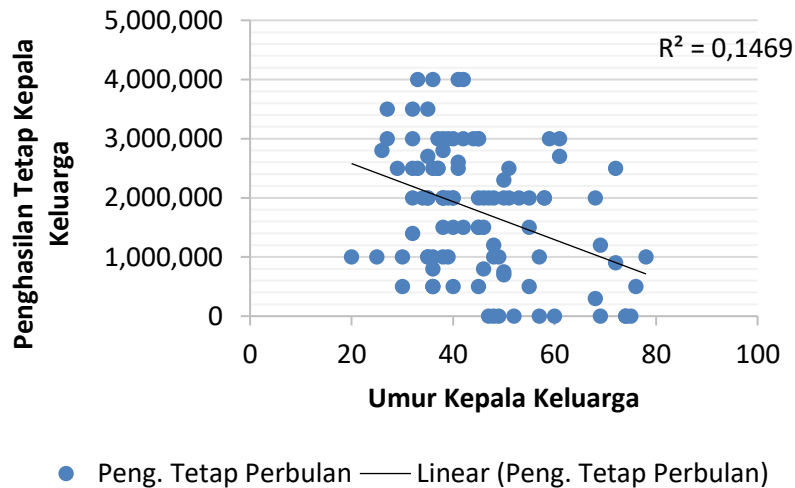
1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warung yang bekerjasama dengan bank. Besaran BPNT sebesar Rp 200.000 dengan membeli sembako seperti beras, telur, daging ayam, tahu/tempe.
2. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH / tahun
 - a. Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
 - b. Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
 - c. SD : Rp. 900.000,-
 - d. SMP : Rp. 1.500.000,-
 - e. SMA : Rp. 2.000.000,-
 - f. Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
 - g. Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-
3. BLT (Bantuan langsung Tunai)
Diterima oleh KPM sebesar Rp 300.000 atau Rp 600.000 sekali penerimaan yang proses pencairannya melalui kantor pos
4. BSU (Bantuan Subsidi Upah) BPJS Ketenagakerjaan karyawan berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan yang aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan akan menerima BSU totalnya sebesar Rp 2.400.000 untuk 2 kali penerimaan
5. Rincian bantuan Prakerja terdiri dari:

Saldo Pelatihan	Rp 1.000.000
Insentif (Rp 600.000 x 4 bulan)	Rp 2.400.000
Insentif pengisian survei (Rp 50.000 x 3)	Rp 150.000
Total	Rp 3.550.000

4.2. Pembahasan Penelitian

4.2.1. Korelasi Umur Kepala Keluarga dan Penghasilan Tetap Kepala Keluarga di Kota Pangkalpinang

Berikut hasil analisis korelasi umur kepala keluarga dan penghasilan tetap kepala keluarga di Kota Pangkalpinang:

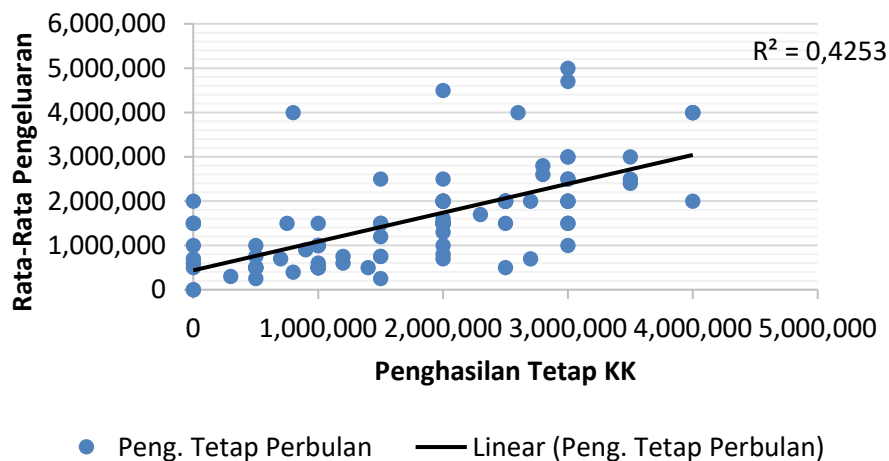


Gambar 6. Korelasi Umur Kepala Keluarga dan Penghasilan Tetap Kepala Keluarga di Kota Pangkalpinang
Sumber: Hasil Survei, 2022

Hasil analisis umur kepala keluarga dan penghasilan tetap kepala keluarga adalah negatif dan sangat lemah, artinya pada umur KK yang masih berusia muda (antara 30–50) kecenderungan penghasilannya tinggi, dan sebaliknya semakin tingginya umur (antara 55 - diatas 60) penghasilan tetap kepala keluarga cenderung menurun.

4.2.2. Korelasi Penghasilan Tetap Kepala Keluarga dan Rata-Rata Pengeluaran Kepala Keluarga Kota Pangkalpinang

Berikut hasil analisis korelasi penghasilan **tetap** kepala keluarga dan rata-rata pengeluaran kepala keluarga Kota Pangkalpinang:

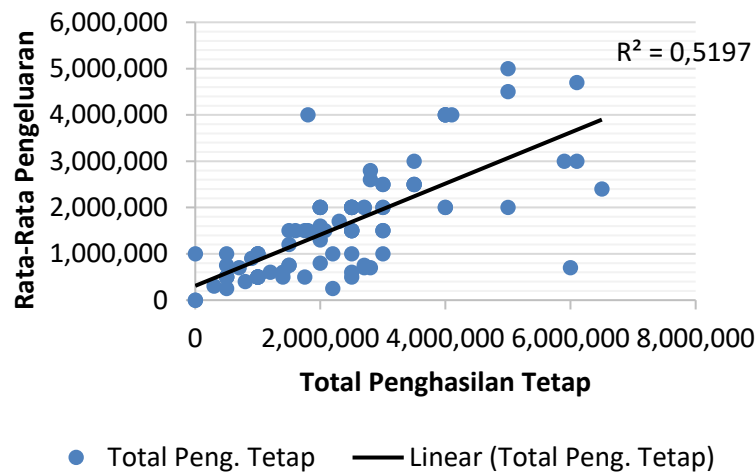


Gambar 7. Korelasi Penghasilan Tetap Kepala Keluarga dan Rata-Rata Pengeluaran Kepala Keluarga Kota Pangkalpinang
Sumber: Hasil Survei, 2022

Hubungan penghasilan tetap kepala keluarga dan rata-rata pengeluaran KK, memiliki hubungan yang positif dan sedang, artinya jika penghasilan tetap KK meningkat maka rata-rata pengeluaran mengalami peningkatan juga demikian sebaliknya.

4.2.3. Korelasi Total Penghasilan Tetap dan Rata-Rata Pengeluaran Kepala Keluarga Kota Pangkalpinang

Berikut hasil analisis **korelasi** total penghasilan tetap dan rata-rata pengeluaran kepala keluarga Kota Pangkalpinang:



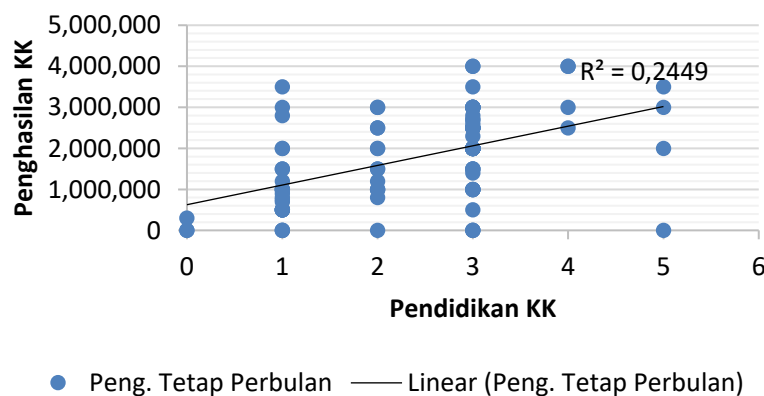
Gambar 8. Korelasi Total Penghasilan Tetap dan Rata-Rata Pengeluaran Kepala Keluarga Kota Pangkalpinang

Sumber: Hasil Survei, 2022

Total penghasilan tetap diperoleh dari penjumlahan penghasilan tetap KK, penghasilan tambahan KK dan penghasilan tambahan keluarga serumah. Diperoleh korelasi total penghasilan tetap dan pengeluaran KK adalah positif dan sedang, yaitu apabila total penghasilan tetap meningkat maka rata-rata pengeluaran pun meningkat.

4.2.4. Korelasi Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga dan Penghasilan Tetap Kepala Keluarga Kota Pangkalpinang

Berikut hasil analisis korelasi pendidikan terakhir kepala keluarga dan penghasilan tetap kepala keluarga Kota Pangkalpinang



Gambar 9. Korelasi Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga dan Penghasilan Tetap Kepala Keluarga Kota Pangkalpinang

Sumber: Hasil Survei, 2022

Korelasi Pendidikan KK dan penghasilan tetap KK memiliki korelasi yang positif dan lemah, artinya semakin tinggi pendidikan KK akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan yang lebih tinggi diperoleh perbulannya dan sebaliknya.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari penelitian ini:

1. Karakteristik kemiskinan Kota Pangkalpinang yaitu kepala keluarga yang disurvei terbanyak memiliki berjenis kelamin laki-laki, berumur 36-43 Tahun, pendidikan terakhir SMA, dengan status pernikahan terbanyak menikah dan jumlah anak sebanyak 2 sedangkan banyak tanggungan sebanyak 3 orang dalam 1 keluarga. Pekerjaan terbanyak berada di sektor lainnya seperti buruh harian, penyedia jasa seperti pembuat batu bata, tukang cabut rumput, pembantu rumah tangga, pengurus kontrakan keluarga, petugas kebersihan dan pungut uang kubur. Karakteristik tempat tinggal responden yaitu milik sendiri dengan luas lantai 6-70 meter persegi, jenis bangunan permanen dengan lantainya keramik. Daya listrik responden sebesar 900 Kwh dan sebanyak 90 persen sudah memiliki kendaraan motor, pendapatan responden berkisar Rp 1.600.000 sampai Rp 2.000.000 sedangkan pengeluaran berkisar antara Rp 500.000 sampai Rp 1.500.000. Jenis bantuan yang diterima responden yaitu PKH, BPNT, BLT, BSU Ketenagakerjaan, Prakerja, KIP dalam bentuk uang dan barang. Sebanyak 90 responden menerima bantuan sosial dan 10 mengaku tidak pernah menerima bantuan.
2. Berdasarkan hasil korelasi diperoleh korelasi umur kepala keluarga dan penghasilan tetap kepala keluarga di Kota Pangkalpinang adalah negatif dan sangat lemah, korelasi penghasilan tetap kepala keluarga dan rata-rata pengeluaran kepala keluarga Kota Pangkalpinang adalah positif dan sedang, korelasi total penghasilan tetap dan rata-rata pengeluaran kepala keluarga Kota Pangkalpinang adalah positif dan sedang, serta korelasi pendidikan terakhir kepala keluarga dan penghasilan tetap kepala keluarga Kota Pangkalpinang adalah positif dan lemah.

5.2. Saran

Perlunya kebijakan dan program pemerintah dilakukan untuk pengentasan kemiskinan sesuai dengan hasil dari kajian ini, sehingga tepat sasaran.

Ucapan Terima kasih

Tim peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bappeda & Litbang Kota Pangkalpinang dan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Bangka Belitung, atas kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga penelitian ini dapat terwujud dan dapat bermanfaat bagi banyak orang.

REFERENSI

- Ali, K. (2015). *Indikator Kemiskinan dan Misklasi Orang Miskin*. Fakultas Ekologi Manusia IPB dengan Yayasan Pustakan Obor Indonesia.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2019). *Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Kesenjangan*.
- Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2017.
- Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2018.
- Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang, Pangkal Pinang Dalam Angka Tahun 2021.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Erlangga.
- Maipita, I. and F. (2014). *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. UPP STIM YKPN. <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/19488>
- Mok, T. Y., Gan, C., & Sanyal, A. (2007). The determinants of urban household poverty in Malaysia. *MODSIM07 - Land, Water and Environmental Management: Integrated Systems for Sustainability, Proceedings, September 2014, 1124–1130*. <https://doi.org/10.3844/jssp.2007.190.196>
- Nazara, S. (2010). Informal Economy in Indonesia: Size, Composition, dan Evolution. In *International Labour Organization*. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_145402.pdf
- Noeraini, A. A. (2013). *Ekonomi Informal Di Indonesia, Suatu Tinjauan Pustaka*. *Fakultas Ekonomi*

Universitas Padjadjaran.

- Ravallion, M. (2007). Urban poverty. *Finance and Development*, 44(3), 15–17.
<https://doi.org/10.4324/9781849772006-8>
- Rangkuti, F. (2016). Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT (22nd ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Saenong, Z. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kota Kendari Tahun 2014. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1.
- Sekaren, U & Bougie, R. (2010). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. London: John Wiley and sons, inc.
- Stephen, T. M. P. & S. (2006). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (III). PT Raja Grafindo Persada.
- Suwandi. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekon, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/ Kota Induk Provinsi Papua*. CV Budi Utama.
- Zhukof, Y. (2010). *Spatial Autocorrelation, IQQS*. Harvard University